

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi Pemili
han Umum Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Um
um Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kot

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Untuk Periode Tahunan 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi Pemili
han Umum Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Um
um Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kot
a Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
apan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan K
omisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi P
emilihan Umum Kota Balikpapan Komisi Pemiliha
n Umum Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umu
m Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
pan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Ko
misi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Komisi Pe
milihan Umum Kota Balikpapan Komisi Pemiliha
n Umum Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umu
m Kota Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
VI. Lampiran dan Daftar	36

Laporan Tahunan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39421764..0 atau mencapai 00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.. atau mencapai 68,05 % dari alokasi anggaran sebesar Rp...

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023

Uraian	PER 31 DESEMBER 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	39,421,764	0.00%	480,084
Belanja Negara	0	0	0.00%	-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp32184283388..0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp30281515250..0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1902768138.0, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp291481800.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp32184283388.0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	30,281,515,250	19,510,712,209	10,770,803,041	55.20
Aset Tetap	1,902,768,138	1,474,192,163	428,575,975	29.07
Piutang Jangka Panjang		-	-	0.00
Aset Lainnya	291,481,800	276,434,800	15,047,000	5.44
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(291,481,800)	(276,434,800)	(15,047,000)	5.44
Jumlah Aset	32,184,283,388	20,984,904,372	11,199,379,016	53.37
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	-	25,633,450	(25,633,450)	-100.00
Jumlah Kewajiban	-	25,633,450	(25,633,450)	-100.00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	32,184,283,388	20,959,270,922	11,225,012,466	53.56
Jumlah Ekuitas Dana	32,184,283,388	20,959,270,922	11,225,012,466	53.56
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	32,184,283,388	20,984,904,372	11,199,379,016	53.37

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Semester II yaitu Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp..0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp86778850699..0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp86778850699..0. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp179363630.0 dan defisit sebesar Rp..0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar -Rp86599487069..0.

Ringkasan Laporan Operasioanl per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2019

Uraian	31-Dec-24	31-Dec-19	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Pendapatan-LO	0			
Beban	86,778,850,699	(33,346,073,202)	120,124,923,901	-360.24
surplus/defisit dari operasi	(86,778,850,699)	(33,346,073,202)		
Kegiatan Non Operasional	179,363,630	8,725,810	170,637,820	1955.55
Pos-pos Luar Biasa				
surplus/defisit dari non operasi	179,363,630	8,725,810	170,637,820	195555.28%
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(86,599,487,069)	(33,337,347,392)	(53,262,139,677)	15976.72%

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp70691148908.0 dikurangi Defisit-LO sebesar -Rp86068418935.0 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp47632634253.0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp32,255,364,226.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 December 2024 dan 2023

Uraian	30-Dec-24	31-Dec-19	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Ekuitas Awal	70,691,148,908	3,029,523,783	67,661,625,125	2233.41
Surplus / Defisit-LO	-86,068,418,935	-33,337,347,392	-52,731,071,543	158.17
Koreksi	0	0	0	0.00
Transaksi Antar Entitas	47,632,634,253	51,267,094,531	-3,634,460,278	-7.09
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	-38,435,784,682	17,929,747,139	-56,365,531,821	-314.37
Ekuitas Akhir	32,255,364,226	20,959,270,922	11,296,093,304	53.90

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Kota Balikpapan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Sekretariat Kota Balikpapan** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Sekretariat Kota Balikpapan**. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan **Sekretariat Kota Balikpapan** yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 2 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, 31 Desember 2024



Susan Charly Rumat, S.H., M.H

f.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
Jalan Jenderal Sudirman No.19
Balikpapan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Tahunan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, 31 Desember 2024

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SEKRETARIAT

Susan Charly Rumaté, S.H., M.H
NIP. 19781002 201012 2 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024		% thd Angg	2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	A				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	0	39,421,764		480,084
JUMLAH PENDAPATAN		0	39,421,764	0.00%	480,084
BELANJA	B				
Belanja Operasi	B.1.1				
Belanja Pegawai	B.1.1a	2,109,522,000	2,093,863,072	99.26%	1,969,046,264
Belanja Barang	B.1.1b	106,516,191,000	78,262,797,958	73.48%	16,291,527,714
Belanja Modal	B.1.1c	1,102,000,000	424,640,852	38.53%	501,317,474
Pinjaman Dari Hibah	B.1.2			0.00%	0
Belanja Pegawai	B.1.2.a		0	0.00%	
Belanja Barang	B.1.2.b			0.00%	
Belanja Modal	B.1.2.c			0.00%	
Jumlah Belanja		109,727,713,000	80,781,301,882	73.62%	18,761,891,452
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.9	0	0	0.00%	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.8	0	0	0.00%	
Belanja Gedung dan Bangunan	B.9	0	0	0.00%	
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.10	0	0	0.00%	
Belanja Modal lainnya	B.11	0	0	0.00%	
Jumlah Belanja Modal		0	0	0.00%	0
JUMLAH BELANJA		109,727,713,000	80,781,301,882	73.62%	18,761,891,452

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	28,814,813,140	63,840,443,764
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	1,262,446,250	1,967,919,000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	204,255,860	3,399,335,882
Jumlah Aset Lancar		30,281,515,250	69,207,698,646
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.11	78,978,709	78,978,709
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.12	-7,897,871	-7,897,871
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.13	71,080,838	71,080,838
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		71,080,838	71,080,838
ASET TETAP			
Tanah	C.14		
Peralatan dan Mesin	C.15	6,448,444,766	5,379,919,914
Gedung dan Bangunan	C.16	130,126,000	103,000,000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.18		
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.19		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4,675,802,628)	(4,070,550,490)
Jumlah Aset Tetap		1,902,768,138	1,412,369,424
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21		
Aset Lain-Lain	C.22	291,481,800	291,481,800
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(291,481,800)	(291,481,800)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		32,255,364,226	70,691,148,908
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga		0	
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	32,255,364,226	70,691,148,908
JUMLAH EKUITAS DANA		32,255,364,226	70,691,148,908
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		32,255,364,226	70,691,148,908

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	Dec-24	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0
Pendapatan Cukai		0	0
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0
Pendapatan Bea Masuk		0	0
Pendapatan Bea Keluar		0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	30,593,764	30,593,764
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		30,593,764	30,593,764
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		30,593,764	30,593,764
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2,093,863,072	1,925,226,164
Beban Persediaan	D.3	7,400,656,016	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	58,799,269,976	11,495,968,917
Beban Pemeliharaan	D.5	389,977,640	250,767,222
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17,489,831,857	1,834,137,550
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bunga		0	0
Beban Subsidi		0	0
Beban Hibah		0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	605,252,138	527,157,573
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	-2,400
Beban Transfer		0	0
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		86,778,850,699	16,033,255,026
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-86,748,256,935	-16,002,661,262

URAIAN	CATATAN	Dec-24	2023
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Jumlah Pendapatan Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/ (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		179,363,630	197,257,000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		179,363,630	197,257,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		179,363,630	197,257,000
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		-86,568,893,305	-15,805,404,262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Dec-24	2023
EKUITAS AWAL	E.1	70,691,148,908	1,465,129,181
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	-86,068,418,935	-16,002,661,178
Koreksi yang menambah/ mengurangi	E.3	0	-900,600
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			-900,600
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset	E.4		0
Penyesuaian Nilai Kewajiban			0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.5		0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6		0
Koreksi atas Reklasifikasi	E.7	0	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.8		0
Koreksi Lain-lain	E.9		79,458,709
Koreksi Pendapatan	E.10		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	47,632,634,253	85,229,581,505
Diterima dari Entitas Lain			0
Ditagihkan kepada Entitas Lain			0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.12	-38,435,784,682	69,226,019,727
EKUITAS AKHIR	E.13	32,255,364,226	70,691,148,908

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum**

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 13 Balikpapan

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan Untuk mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga."

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satker dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik dan spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan."

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satker adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Adalah sebagai berikut:
 - 1 Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2 Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3 Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri keuangan No. 01/PMK.06/013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Dec-24		Persentase
	ANGGARAN	Realisasi	
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	0	0	0.00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak		39,421,764	
Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00%
Jumlah Pendapatan	0	39,421,764	0
BELANJA			
Belanja Pegawai	2,109,522,000	2,093,863,072	99.26%
Belanja Barang	106,516,191,000	78,262,797,958	73.48%
Belanja Modal	1,102,000,000	424,640,852	38.53%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah Belanja	109,727,713,000	80,781,301,882	73.62%

Realisasi
Pendapatan
Rp39421764..

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39421764.0 atau mencapai 0,000% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Dec-24		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa	0	0	0.00
Pendapatan Bukan Pajak	0	Rp 39,421,764	0.00
Jumlah	0	39,421,764	0.00

Realisasi Pendapatan Semester 1 Tahun 2024 dan 2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 00 persen dari realisasi pendapatan dari PNBPN TA 2023.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya aktivitas jasa sewa fasilitas gedung dan bangunan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
2. Tidak adanya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0.00
Pendapatan Dari Pemindaan BMN	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

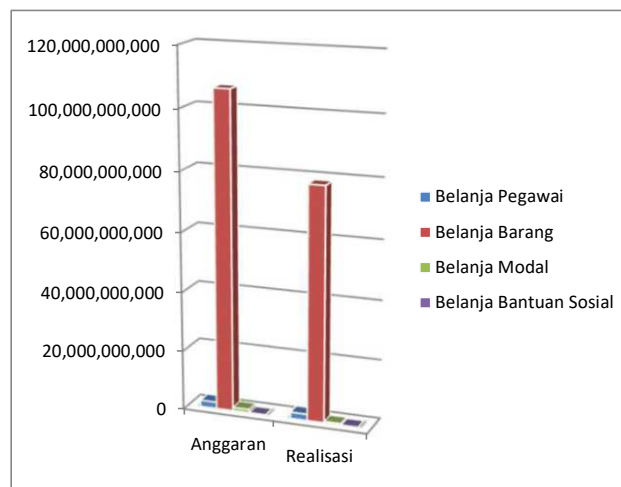
B.2. Belanja

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada TA 2024 adalah sebesar Rp80781301882.0 atau 95% dari anggaran senilai Rp109727713000.0. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	Dec-24		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,109,522,000	2,093,863,072	99.26
Belanja Barang	106,516,191,000	78,262,797,958	73.48
Belanja Modal	1,102,000,000	424,640,852	38.53
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	109,727,713,000	80,781,301,882	73.62
Pengembalian			0.00
Jumlah	109,727,713,000	80,781,301,882	73.62

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2024 Per 31 Desember 2024 , Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 485 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,109,522,000	1,969,046,264	7.13
Belanja Barang	106,516,191,000	16,291,527,714	553.81
Belanja Modal	1,102,000,000	501,317,474	119.82
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	109,727,713,000	18,761,891,452	484.84

*Belanja Pegawai
Rp2109522000.0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada TA 2024 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2109522000.0 dan Rp1969046264.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 007 persen dari realisasi belanja TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Banyaknya Kegiatan Tahapan Pemilukada yang mengharuskan Pegawai Sekretariat KPU Kota Balikpapan dan Komisioner KPU Balikpapan melakukan Perjalanan Dinas pada TA
2. Adanya kegiatan Monitoring verifikasi Faktual Partai Politik pada TA 2020 sehingga kehadiran Pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Per 31 Desember 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,109,522,000	1,969,046,264	7.13
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0.00
Belanja Honorarium	0	0	0.00
Belanja Lembur	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	2,109,522,000	1,969,046,264	7.13
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja	2,109,522,000	1,969,046,264	7.13

*Belanja Barang
Rp86778850699.0*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86778850699.0 dan Rp16033257426.0.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 89.98% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain adanya pembelian barang untuk kebutuhan pelaksanaan PILKADA serentak Tahun 2020 sehingga berdampak pada kenaikan belanja barang terhadap kebutuhan PILKADA serentak

Perbandingan Belanja Barang 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,093,863,072	1,925,226,164	8.76
Belanja Barang Persediaan	7,400,656,016	0	0.00
Belanja Jasa	58,799,269,976	11,495,968,917	411.48
Belanja Pemeliharaan	389,977,640	250,767,222	55.51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17,489,831,857	1,834,137,550	853.57
Beban Penyusutan dan Amortisasi	605,252,138	527,157,573	
Realisasi Belanja Bruto	86,778,850,699	16,033,257,426	441.24
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0.00
Realisasi Belanja Netto	86,778,850,699	16,033,257,426	441.24

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp689976700.0*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dan 2019 Rp689976700.0 dan Rp792231400..0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar persen 240.71 % & dibandingkan Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin TA 2023. Hal ini disebabkan Karena Belanja Modal Untuk Kegiatan PEMILU Tahun 2019."telah dilaksanakan di Tahun 2018

Perbandingan Belanja Modal 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Mobil	508,000,000	2,260,000	22377.88
Sepeda Motor		49,700,000	-100.00
Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner		8,200,000	-100.00
AC. Split	20,000,000	27,750,000	-27.93
Unit Power Suply		2,323,200	-100.00
Sound Sistem		14,795,000	-100.00
Finger Print Time and Attandance Acces Control System		3,795,000	-100.00
Serial Scanner		4,350,000	-100.00
PC. Unit	27,000,000	40,350,000	-33.09
Laptop	14,430,000	138,379,280	-89.57
Note Book		8,668,000	-100.00
Scanner Peralatan Mini Komputer		121,370,000	-100.00
Printer	33,937,600	17,581,920	93.03
Scanner	14,076,400	40,000,000	-64.81
External Hardisk	3,712,500	3,509,000	5.80
AC Central		19,100,000	-100.00
Lemari Besi		29,800,000	-100.00
Fillingkabibet besi		5,500,000	-100.00
Meja Kerja Besi		9,600,000	-100.00

Kursi Besi/Metal	42,800,000	9,600,000	345.83
meja Rapat	20,000,000	15,000,000	33.33
Mesin Pemotong Rumput		4,700,000	-100.00
Video Monitor		192,500,000	-100.00
Kursi Dorong		23,400,000	-100.00
UPS	6,020,200		
Infocus	20,000,000		
Standing AC	22,500,000		
HT	18,000,000		
Meja Kerja Kayu	28,800,000		
Kamera Video	12,500,000		
Hanycam	5,000,000		
Tustel	15,000,000		
Televisi	3,000,000		
Realisasi Belanja Bruto	814,776,700	792,231,400	2.85
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Realisasi Belanja Netto	689,976,700	792,231,400	-12.91

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	2024	2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Kas lainnya dan setara kas	Rp 28,814,813,140	Rp 63,840,443,764
4	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp 1,262,446,250	Rp 1,967,919,000
5	Persediaan	Rp 204,255,860	Rp 3,399,335,882
6	Persediaan yang belum diregister	Rp -	Rp -
Jumlah		30,281,515,250	69,207,698,646

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp,28,814,813,140

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan TA,2023 masing-masing sebesar Rp,28,814,813,140 dan Rp.63,840,443,764.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Per 31 Desember 2024	T.A. 2023
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	0	-
Pajak PPh yang Belum Disetor	0	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0	-
Hibah Pilkada Yang Belum di Sahkan	Rp 28,814,813,140	63,840,443,764
Jumlah	Rp 28,814,813,140	63,840,443,764

PERSEDIAAN
Rp,204,255,860

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp,204,255,860 dan Rp,3,399,335,882.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan. Rincian Persediaan per Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	Per 31 Desember 2024	T.A. 2023
Barang Konsumsi	0	0
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	Rp 204,255,860.0	Rp 3,399,335,882.0
Jumlah	Rp 204,255,860.0	Rp 3,399,335,882.0

Tanah Rp.0

C.4. Tanah

Tidak terdapat nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Per 31 Desember 2024 dan 2023, hal ini dikarenakan bahwa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor KPU Kota Balikpapan saat ini adalah merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Balikpapan

Peralatan dan Mesin
Rp,1,780,394,658

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1,780,394,658 dan Rp5,379,919,914. adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TP/TGR)

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5,379,919,914
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	1,068,524,852
- hibah	Rp	-
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
- penghapusan	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	6,448,444,766
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(4,668,050,108)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	Rp	1,780,394,658

Gedung dan Bangunan
Rp.130,126,000

C.6 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp,130,126,000 , hal ini dikarenakan gedung dan bangunan yang saat ini digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah pinjam pakai dari Pemerintah Kota

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap -
Rp,4,675,802,628

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar -Rp,4,675,802,628 dan Rp,1,902,768,138

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kualitas Piutang	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	Rp 6,448,444,766	(4,668,050,108)	Rp 1,780,394,658
Gedung dan Bangunan	Rp 130,126,000	(7,752,520)	Rp 122,373,480
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Lain- Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	6,578,570,766	(4,675,802,628)	1,902,768,138

C.8. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp,291,481,800 dan -Rp,291,481,800

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Tana Paser serta dalam proses penghapusan dari BMN.setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah "&"dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:"

Saldo per 31 Desember 2024,	291,481,800	
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN		
Saldo per 31 Desember 2024,	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	(291,481,800)	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	(291,481,800)

Rincian Aset Lain- Lain

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Tidak terdapat Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp.0 ,Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Jenis	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	291,481,800	(291,481,800)	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp -	
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp -	
3	Utang kepada Pihak Ketiga lainnya	Rp -	
Jumlah		0	0

TPA Rp.0

Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
4		Rp -	
Total		Rp -	

Ekuitas
Rp,32,255,364,226

C.13 Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp,32,255,364,226 dan Rp,70,691,148,908

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp,30,593,764

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,30,593,764 dan Rp,30,593,764. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Dec-24	2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp 30,593,764	Rp 30,593,764	0.00
Pendapatan Dari Pemindaan BMN	Rp -		0.00
Jumlah	Rp 30,593,764	Rp 30,593,764	0.00

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-yang diterima dari Pengembalian atas temuan ,Sedangkan Pendpatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2024

Beban Pegawai
Rp,2,093,863,416

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 473,454,800	Rp 430,232,900	9.13
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 6,326	Rp 8,243	(30.30)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 35,709,800	Rp 34,088,290	4.54
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 11,577,412	Rp 10,412,008	10.07
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 47,880,000	Rp 47,880,000	0.00
Beban Tunj. Pph PNS	Rp 3,738,804	Rp 957,550	74.39
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 28,388,640	Rp 28,895,580	(1.79)
Beban Uang Makan PNS	Rp 50,968,000	Rp 70,084,000	(37.51)
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 12,880,000	Rp 12,880,000	0.00
Beban Uang Lembur		0	0.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 601,008,372	Rp 520,877,300	13.33
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp 828,251,262	Rp 812,730,500	1.87
Jumlah	Rp 2,093,863,416	Rp 1,969,046,371	5.96

Beban Persediaan
Rp,2,147,111,235

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,2,147,111,235 dan Rp,4,351,733,444.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 2,147,111,235	Rp 300,968,500	85.98
Beban Persediaan Bahan Baku		Rp 4,050,764,944	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang		Rp -	0.00
Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	0.00
Jumlah Beban Persediaan	Rp 2,147,111,235	Rp 4,351,733,444	(102.68)

Beban Barang dan
Jasa
Rp,58,235,877,226

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,58,235,877,226 dan Rp,13,471,582,946.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 92,602,384	Rp 43,697,879	52.81
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 50,464,000	Rp 312,000	99.38
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 17,926,500	Rp 139,020,000	(675.50)
Beban Barang Operasional Lainnya		Rp 17,924,500	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19		Rp 2,256,200	0.00
Beban Bahan	Rp 15,309,757,369	Rp 2,173,545,074	85.80
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 20,251,195,600	Rp 8,039,620,000	60.30
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 10,485,524,790	Rp 595,547,566	94.32
Beban Langganan Listrik	Rp 124,294,985	Rp 119,041,355	4.23
Beban Langganan Telepon	Rp 48,101,383	Rp 53,720,972	(11.68)
Beban Sewa	Rp 1,035,350,495	Rp 2,111,082,000	(103.90)
Beban Jasa Profesi	Rp 622,153,982	Rp 51,600,000	91.71
Beban Jasa Lainnya	Rp 10,198,505,738	Rp 124,215,400	98.78
Beban Jasa - Penangan Pandemi Covid -19		Rp -	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin		Rp -	0.00
Jumlah	Rp 58,235,877,226	Rp 13,471,582,946	76.87

Beban
Pemeliharaan
Rp,389,977,640

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,389,977,640 dan Rp,349,210,236.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 149,852,971	Rp 106,589,000	28.87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 240,124,669	Rp 242,621,236	(1.04)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp -	Rp -	0.00
Jumlah	Rp 389,977,640	Rp 349,210,236	10.45

Beban Perjalanan
Dinas
Rp,17,492,636,857

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,17,492,636,857 dan Rp,1,840,137,550,

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 1,340,112,552	Rp 1,081,714,079	19.28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1,934,290,000	Rp 124,880,000	93.54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 13,176,699,880	Rp 565,755,055	95.71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 1,041,534,425	Rp 67,788,416	93.49
Jumlah	Rp 17,492,636,857	Rp 1,840,137,550	89.48

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian

Rincian Beban Bantuan Sosial Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik
Beban Bantuan Sosial Untuk	Rp -	Rp -	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk	Rp -	Rp -	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk	Rp -	Rp -	0.00
Jumlah	Rp -	Rp -	0.00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,605,252,138 dan Rp,527,157,573,

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 605,252,138	Rp 527,157,573	12.90
2	Beban Penyusutan Penyusutan Aset			
	Jumlah Penyusutan	Rp 605,252,138	Rp 527,157,573	12.90
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	0.00
2	Beban Penyusutan aset lain-lain	Rp -	Rp -	0.00
	Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp -	0.00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 605,252,138	Rp 527,157,573	20.88

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:"

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
1.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	Rp -	Rp -	0.00
2.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	Rp -	Rp -	0.00
	Jumlah	Rp -	Rp -	0.00

Beban Lain-lain
Rp,0

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 323,266,400

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Beban Lain-lain untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Desember 2024	2023	Naik (Turun)
1	Beban pelepasan Aset Non Lancar			0.00
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -		0.00
3	Beban Dari Kegiatan Non Operasional			0
	Jumlah Penyusutan	Rp -	Rp -	0.00%

Kegiatan Non
Operasional Rp,0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dana fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:"

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja barang			0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*)			0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			0.00
Kerugian Persediaan			0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp -	Rp -	0.00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2024

URAIAN	TH 2023		TH 2024		Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	Rp	-	Rp	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	Rp	-	0.00
Beban Persediaan	Rp	-	Rp	-	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	-	0.00

Pendapatan PNB di atas merupakan hasil Penjualan Bilik dan Kotak Almunium. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana. Tidak terdapat pendapatan dari pos luar biasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023

1 E, PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp,70,691,148,908

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp,70,691,148,908 dan Rp,1,465,129,181,

Surplus (Defisit) LO -
Rp,86,568,893,305

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar -Rp 86,568,893,305 dan -Rp 15,805,404,262,

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Desember 2024 dan 2023, adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir,

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya,

Koreksi Nilai Persediaan untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
SP2HL hibah Pilkada Sebesar	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp -
Jumlah	Rp -

Koreksi Aset Tetap Rp.
0

E.8 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan, Koreksi pencatatan aset tetap untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 0 dan Rp, 0,

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan,

Koreksi Atas Beban
Rp. 0

E.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan, Koreksi atas Beban untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 0 dan Rp, 0, Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:"

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	Rp -
Beban Jasa	Rp -
Jumlah	Rp -

E.10 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan, Koreksi atas Pendapatan untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 0 dan Rp, 0, Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	2024	2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	Rp -	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -
Koreksi Piutang	Rp -	Rp -
Koreksi Kewajiban	Rp -	Rp -
Koreksi Hibah	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

E.11 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 717,315,119 dan Rp 69,196,841,670, Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN,

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis Aset Tetap	2024	2023
Ditagihkan Ke Entitas Lain	Rp 1,012,646,262	Rp 25,590,553,775
Diterima Dari Entitas Lain	Rp (19,795,000)	Rp (301,666,000)
Transfer Keluar		
Transfer Masuk		Rp 2,552,259,797
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU		
Pengesahan Hibah Langsung		Rp 23,500,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		Rp (74,053,041)
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	Rp (275,536,143)	Rp 17,929,747,139
Jumlah	Rp 717,315,119	Rp 69,196,841,670

E.12 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Jumlah Kenaikan/ Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar -Rp 38,435,784,682 dan Rp 69,226,920,327

Rincian Kenaikan/ Penurunan Transaksi Antar Entitas

Jenis Aset Tetap	Dec-24	2023
Ekuitas Awal	Rp 70,691,148,908	Rp 1,465,129,181
Surplus / Defisit- LO	Rp (86,068,418,935)	Rp (16,002,661,178)
Koreksi yang menambah / mengurangi	Rp -	
Transaksi antar Entinitas	Rp 47,632,634,253	Rp 85,229,581,505
Koreksi Hibah	Rp -	Rp -
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	Rp(38,435,784,682)	Rp 69,226,920,327
Jumlah	Rp 32,255,364,226	Rp 70,692,049,508

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 32,255,364,226 dan Rp 70,692,049,508

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- 1 KPU Balikpapan telah melaksanakan semua mekanisme pengelolaan dan penerimaan Hibah Operasional sesuai dengan mekanisme APBN (PMK) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
- 2 Sampai dengan tanggal pelaporan sisa hibah operasional tahun 2020 telah dikembalikan/disetorkan ke kas Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- 1 Terdapat Kas Lainnya dan setara kas sebesar Rp. 28.814.813.140 yang merupakan sisa hibah pemilukada 2024 yang belum disahkan
- 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Pada Tahun 2024 Mengadakan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024
- 3 DIPA yang selalu berubah/revisi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga menyulitkan penggunaan maupun realisasi anggaran yang telah terpakai dan kegiatan karena harus menyesuaikan dengan DIPA/RKA yang hasil revisi.
- 4 Masih terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan dan peruntukannya sehingga menyulitkan pelaksana anggaran dan kegiatan.
- 5 Masih terdapat kegiatan yang tidak memiliki anggaran dalam Pemilu 204 sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan khususnya tahapan Pemilu tahun 2024
- 6 KPU Balikpapan Menerima HIBAH Pemilukada Tahun 2024 Berupa Rupiah Murni dari Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.500.000.000, NPHD No. 978.4/0008/BPKD Nomor: 54/KPU-Bpp/6471/Sek-Kot/III/2020 tanggal 10-03-2020
- 7 KPU Balikpapan Mengembalikan bukti Setor Pengembalian TUP tetap Waktu (Bukti Terlampir)
- 9 KPU Kota Balikpapan telah melakukan NPHD dengan PEMDA kota Balikpapan untuk pengadaan PILKADA tahun 2024, dimana KPU Kota Balikpapan Menerima Hibah Rp.63.809.850.000 berdasarkan NPHD 900/1028/Bangkesbangpol-PO dan Nomor: 1/1749/HM.03-/6471/2023
- 10 Terdapat Jurnal Manual yang dilakukan yaitu Jasa Giro tahun 2023 yang disetor Januari 2024 Sebesar Rp. 30.593.764
- 11 Terdapat Sewa Gudang Logistik Pemilu sd Oktober 2025 dan Gudang Pilkada Rp.1.262.446. 250



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN



Nomor : 900/1028/Bankesbangpol-PO

Nomor : 1749/HM.03-NK/6471/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 Nomor 1, Balikpapan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NOOR THOHA, S.Pd., S.H : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berdasarkan SK KPU Nomor 710/PP.06 Kpt/05/KPU/III/2019 berkedudukan dan beralamat, di Jalan Jenderal Sudirman RT. 09 Nomor 9, Balikpapan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 tahun 2022 tentang Standar Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

19. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-425/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-54/2023 tentang Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
21. Berita Acara Hasil Rapat Verifikasi Rencana Anggaran Biaya Hibah Pilkada Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023;
22. Berita Acara Hasil Rapat Lanjutan Verifikasi Rencana Anggaran Biaya Hibah Pilkada Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2023; dan
23. Berita Acara Hasil Rapat Lanjutan Finalisasi Hibah Pendanaan Pilkada Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2023.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023; dan
- b. bahwa hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp. 63.809.850.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

PASAL 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.

- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Balikpapan ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Bank Nomor Rekening Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** yang dilampiri dengan:
- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar **Rp. 63.809.850.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

dan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

PASAL 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Balikpapan Tahun 2024.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya,

makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Balikpapan.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 tahun 2022 tentang Standar Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa

dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kota Balikpapan harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2024, terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

PASAL 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN



(NOOR THOHA, S.Pd., S.H)

PIHAK KESATU

WALI KOTA BALIKPAPAN



(H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA BALIKPAPAN 658944

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:03 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	39,421,764	39,421,764	0	0	480,084	(480,084)	0	
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	39,421,764	39,421,764	0	0	480,084	(480,084)	0	
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	39,421,764	39,421,764	0	0	480,084	(480,084)	0	
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	109,727,713,000	80,781,301,882	(28,946,411,118)	73.62	20,659,955,000	18,761,891,452	1,898,063,548	90.81	
1. Belanja Pegawai	2,109,522,000	2,093,863,072	(15,658,928)	99.26	1,969,057,000	1,969,046,264	10,736	100	
2. Belanja Barang	106,516,191,000	78,262,797,958	(28,253,393,042)	73.48	18,045,196,000	16,291,527,714	1,753,668,286	90.28	
3. Belanja Modal	1,102,000,000	424,640,852	(677,359,148)	38.53	645,702,000	501,317,474	144,384,526	77.64	
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	

f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA BALIKPAPAN 658944

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:03 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	109,727,713,000	80,781,301,882	(28,946,411,118)	73.62	20,659,955,000	18,761,891,452	1,898,063,548	90.81
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Balikpapan, 2 Maret 2025
Pernadling Jawab UAKPA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUSAN CHARLY RUMATE
NRP 197810022010122001

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 658944
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR
KPU KOTA BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/02/25 2:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/2/25 11:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	432,738,000	473,456,000	473,454,800	0	473,454,800	100	1,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	10,000	6,326	344	5,982	59.82	4,018
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34,224,000	35,714,000	35,709,800	0	35,709,800	99.99	4,200
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,440,000	11,580,000	11,577,412	0	11,577,412	99.98	2,588
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	47,880,000	0	47,880,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	335,000	3,745,000	3,738,804	0	3,738,804	99.83	6,196
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,396,000	28,389,000	28,388,640	0	28,388,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	88,630,000	57,787,000	50,968,000	0	50,968,000	88.2	6,819,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,880,000	12,880,000	12,880,000	0	12,880,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	657,533,000	671,441,000	664,603,782	344	664,603,438	98.98	6,837,562
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	812,731,000	828,261,000	828,251,262	0	828,251,262	100	9,738
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	812,731,000	828,261,000	828,251,262	0	828,251,262	100	9,738
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	562,460,000	609,820,000	601,008,372	0	601,008,372	98.56	8,811,628
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	562,460,000	609,820,000	601,008,372	0	601,008,372	98.56	8,811,628
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,032,724,000	2,109,522,000	2,093,863,416	344	2,093,863,072	99.26	15,658,928
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	72,000,000	135,793,000	92,602,384	0	92,602,384	68.19	43,190,616
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,600,000	55,192,000	50,464,000	0	50,464,000	91.43	4,728,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,500,000	17,927,000	17,926,500	0	17,926,500	100	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	197,100,000	208,912,000	160,992,884	0	160,992,884	77.06	47,919,116
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,691,096,000	16,780,781,000	15,309,757,369	0	15,309,757,369	91.23	1,471,023,631
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,967,450,000	20,465,378,000	20,251,195,600	0	20,251,195,600	98.95	214,182,400
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,746,853,000	15,761,142,000	10,485,524,790	0	10,485,524,790	66.53	5,275,617,210
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	31,405,399,000	53,007,301,000	46,046,477,759	0	46,046,477,759	86.87	6,960,823,241
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	861,512,000	4,722,536,000	2,147,111,235	0	2,147,111,235	45.47	2,575,424,765
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	861,512,000	4,722,536,000	2,147,111,235	0	2,147,111,235	45.47	2,575,424,765

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 658944
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR
KPU KOTA BALIKPAPAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 28/02/25 2:36 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 28/2/25 11:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	30,000,000	148,445,000	124,294,985	0	124,294,985	83.73	24,150,015
522112	Belanja Langganan Telepon	0	84,106,000	48,101,383	0	48,101,383	57.19	36,004,617
522141	Belanja Sewa	34,044,000	1,207,001,000	1,035,350,495	0	1,035,350,495	85.78	171,650,505
522151	Belanja Jasa Profesi	0	4,478,599,000	622,153,982	0	622,153,982	13.89	3,856,445,018
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,640,286,000	10,250,170,000	10,198,505,738	0	10,198,505,738	99.5	51,664,262
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,704,330,000	16,168,321,000	12,028,406,583	0	12,028,406,583	74.39	4,139,914,417
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,060,000	1,064,485,000	149,852,971	0	149,852,971	14.08	914,632,029
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,400,000	885,700,000	240,124,669	0	240,124,669	27.11	645,575,331
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	99,460,000	1,950,185,000	389,977,640	0	389,977,640	20	1,560,207,360
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	451,790,000	6,398,508,000	1,340,112,552	0	1,340,112,552	20.94	5,058,395,448
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,708,000	6,939,902,000	1,934,290,000	510,000	1,933,780,000	27.86	5,006,122,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,007,049,000	13,184,738,000	13,176,699,880	2,295,000	13,174,404,880	99.92	10,333,120
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	136,000,000	3,935,788,000	1,041,534,425	0	1,041,534,425	26.46	2,894,253,575
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,720,547,000	30,458,936,000	17,492,636,857	2,805,000	17,489,831,857	57.42	12,969,104,143
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	43,988,348,000	106,516,191,000	78,265,602,958	2,805,000	78,262,797,958	73.48	28,253,393,042
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,102,000,000	424,640,852	0	424,640,852	38.53	677,359,148
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,102,000,000	424,640,852	0	424,640,852	38.53	677,359,148
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,102,000,000	424,640,852	0	424,640,852	38.53	677,359,148
	JUMLAH BELANJA	46,021,072,000	109,727,713,000	80,784,107,226	2,805,344	80,781,301,882	73.62	28,946,411,118

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658944) KPU KOTA BALIKPAPAN

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:02 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	30,593,764	30,593,764	0	0
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	30,593,764	30,593,764	0	0
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	30,593,764	30,593,764	0	0
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,093,863,072	1,925,226,164	168,636,908	8.759
Beban Persediaan	7,400,656,016	0	7,400,656,016	
Beban Barang dan Jasa	58,799,269,976	11,495,968,917	47,303,301,059	411.477
Beban Pemeliharaan	389,977,640	250,767,222	139,210,418	55.514
Beban Perjalanan Dinas	17,489,831,857	1,834,137,550	15,655,694,307	853.573
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

f

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658944) KPU KOTA BALIKPAPAN

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:02 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	605,252,138	527,157,573	78,094,565	14.814
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(2,400)	2,400	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	86,778,850,699	16,033,255,026	70,745,595,673	441.243
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(86,748,256,935)	(16,002,661,262)	(70,745,595,673)	442.086
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	8,828,000	0	8,828,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	8,828,000	0	8,828,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	671,010,000	84	671,009,916	798,821,328.5
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	671,010,000	84	671,009,916	798,821,328.5
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	679,838,000	84	679,837,916	809,330,852.3
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(86,068,418,935)	(16,002,661,178)	(70,065,757,757)	437.838
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(86,068,418,935)	(16,002,661,178)	(70,065,757,757)	437.838

f

Keterangan :
FINAL



Balikpapan, 2 Maret 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
SUSAN CHARLY RUMATE
NIP. 197810022010122001

f

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658944) KPU KOTA BALIKPAPAN

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:03 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	30,593,764	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	28,784,219,376	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,262,446,250	0
0.0	117131	Bahan Baku	204,255,860	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,448,444,766	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	130,126,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,668,050,108
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,752,520
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	78,978,709	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	7,897,871
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	291,481,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	291,481,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	45,755,671,258
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	39,421,764	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,916,384,759
0.0	391111	Ekuitas	0	70,691,148,908
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	8,828,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	30,593,764
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	671,010,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	473,454,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,982	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	35,709,800	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,577,412	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,738,804	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	28,388,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	50,968,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,880,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	828,251,262	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	601,008,372	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	92,602,384	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,464,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	17,926,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,167,677,369	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	20,251,195,600	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,485,524,790	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	124,294,985	0

f

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658944) KPU KOTA BALIKPAPAN

Tgl Data : 02/03/25 8:52 AM
Tgl Cetak : 02/03/25 12:03 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	48,101,383	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,740,823,245	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	622,153,982	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,198,505,738	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,852,971	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,124,669	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,340,112,552	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,933,780,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,174,404,880	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,041,534,425	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	602,649,618	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,602,520	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	93,466,100	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	7,307,189,916	0
JUMLAH			124,048,818,988	124,048,818,988

Keterangan :
FINAL

Penyusunan, 2 Maret 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
SEKRETARIAT
SUSAN CHARLY RUMATE
NIP. 197810022010122001

f